**IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN
RELEVANSINYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)**

Siti Nisaus Sholihah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

E-mail : snisa6389@gmail.com

ABSTRACT

Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 which is enhanced by Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases in Court. The existence of a new electronic religious court system presented by the Supreme Court is a change that is expected to make it easier for litigants to settle, especially divorce cases which become the focus of this research. The purpose of this research is to determine and to analyze the implementation of e-court applications in divorce cases and the relevance of e-court application implementation with simple, fast and low-cost principles in the Kediri Regency Religious Court. The type of research conducted by researcher is empirical legal research method, where the research in question uses empirical facts by conducting interviews to obtain the necessary data, the approach uses a sociological legal approach that analyzes reactions and interactions when legal norms run in society. There are two supporting data in the study which include primary data and secondary data with interview and documentation, data collection techniques, then the data is analyzed with stages of data reduction, data validation, data classification and data analysis. From research result, it was explained that the process from trial to reading of the verdict was considered more efficient and ran simpler and faster and from the research data, the implementation of e-court was quite effective because the data from 2020-2022 was quite improved.

Keywords : : *Implementation, E-court, Divorce, Simple Principle, Fast and Low Cost.*

PENDAHULUAN

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan untuk melayani masyarakat dengan bentuk elektronik, mulai dari pendaftaran, taksiran panjar biaya perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan yang semuanya dilaksanakan secara online dengan melengkapi dan mengirim dokumen persidangan.

Pelayanan administrasi secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara dan mencari keadilan, dengan pelayanan secara elektronik, Mahkamah Agung RI dapat berupaya menjawab tiga persoalan utama yang sering terjadi di Pengadilan, diantaranya keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*acces*), dan integritas (*integrity*). Dengan upaya ini maka dapat meminimalisir masyarakat dari kekurangan informasi dan wawasan tentang pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2019:7)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan

biaya ringan. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan administrasi dan persidangan agar dengan upaya ini dapat menangani kendala dalam pelaksanaan peradilan.

Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang menjadikan salah satu alasan bahwa dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan harus berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam penjelasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu adanya penyempurnaan, terkhusus pada tata cara persidangan. Oleh karena itu ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Perceraian adalah perkara yang paling banyak didaftarkan di Pengadilan, terlebih pada saat wabah covid-19 meningkat di Indonesia, rata-rata penyebab dari perceraian ini adalah karena faktor ekonomi, sebab pada masa covid-19, perekonomian dunia khususnya Indonesia benar-benar diuji, dan alasan inipun menjadi alasan para penggugat untuk mengugat cerai pasangannya, mirisnya pernikahan yang baru dibangun beberapa tahun kemudian

kandas karena ada faktor ekonomi (Rozak,dkk, 2021:63)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjelaskan bahwa yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan efisien dan efektif, “biaya ringan” yaitu biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tetapi dengan asas sederhana cepat biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dipengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, kemudian yang dimaksud “cepat” tidak dibahas dalam penjelasan, oleh karenanya ini dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dari aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu kasus atau perkara.

Dalam penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentu saja semua perkara dapat didaftarkan mulai dari perkara perceraian, hak asuh anak, wakaf, waris dan semua perkara yang dapat diselesaikan dilingkup peradilan agama. Hal ini tentu diyakinkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian terkait implementasi *e-court*, dalam penelitian ini peneliti melibatkan beberapa narasumber untuk memperoleh datanya, yaitu wawancara dengan pihak yang menangani *e-court* juga dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang tentu memutuskan perkara secara *e-court*. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada perkara perceraian, dimana perkara perceraian adalah perkara yang sudah tidak asing dimasyarakat, yang tentunya menjadi perkara paling sering didaftarkan di Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui implementasi aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi implementasi aplikasi *e-court* dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal ataupun nyata yang berada dilapangan (Fajar, Ahmad, 2010:280).

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan sosiologis hukum, dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berjalan di masyarakat (Muhaimin, 2020:89)

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim dan pihak yang berkaitan dengan penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri, sebagai sumber data dalam penelitian atau bisa disebut dengan informan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu (1) Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait, yaitu dengan Panitera Hukum Muda (Staf bagian administrator *e-court*) yang memproses pendaftaran dalam mendaftarkan perkara secara *e-court* dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memproses jalannya persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). (2) Sumber data sekunder, data sekunder adalah data dari bacaan yang berupa buku, jurnal maupun artikel yang sejalan dengan judul yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Pengumpulan data dengan teknik observasi adalah melakukan pengamatan langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga didapatkan gambaran secara jelas dalam proses pengumpulan datanya (Fatoni, Abdurrahman, 2010:104).

Untuk teknik wawancara dilakukan langsung dengan narasumber terkait, meliputi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Staf administrator *e-court*. Selain wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, dimana dokumentasi adalah teknik pengumpulan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan seperti gambar, buku, undang-undang, jurnal dan artikel.

Pada teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dengan triangulasi data, dalam teknik ini adalah tahapan analisa data terhadap kebenaran data dengan menggunakan metode pengumpulan data, agar data yang dimaksud valid dan memberikan keyakinan kepada peneliti tentang keabsahan data (Bachri, Bachtiar S, 2012:46).

Adapun tahapan dalam teknik analisa data dalam penelitian yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan merangkum data-data pokok sesuai dengan fokus penelitian Kedua validasi data, teknik ini adalah tahapan yang dilakukan untuk memaksimalkan objektivitas data penelitian, pada tahap ini data yang diperoleh dipengaruhi oleh pandangan peneliti, dan sangat berkaitan dengan keabsahan data implementasi aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Ketiga klasifikasi data, yaitu pemisahan data atau memilih-milih data, pada tahap ini peneliti menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait presentase pelaksanaan aplikasi *e-court* pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Keempat analisis data, teknik ini merupakan teknik terakhir, yaitu penelusuran data atau proses secara sistematis untuk menyusun data. Dalam menyusun

ini nantinya bertujuan untuk menemukan manfaat dan kesimpulan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti telah memperoleh data terkait implementasi aplikasi e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang menjadi fokus penelitian. Terkait jumlah dari penyelesaian perkara perceraian sebagai berikut :

Tabel 1: Data perkara perceraian secara e-court di PA Kabupaten Kediri tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Penyelesaian	Rasio Penyelesaian	Sisa
1	Perdata Gugatan	27	424	451	51	332	383	84.92 %	68
2	Perdata Permohonan	0	32	32	3	28	31	96.88 %	1
Jumlah		27	456	483	54	360	414	85.71	69

Tabel 2 : Data perkara perceraian secara e-court di PA Kabupaten Kediri tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Penyelesaian	Rasio Penyelesaian	Sisa
1	Perdata Gugatan	68	733	801	65	678	743	92.76 %	58
2	Perdata Permohonan	1	77	78	16	59	75	96.15 %	3
Jumlah		69	810	879	81	737	818	93.06.00	61

Tabel 3 : Data perkara perceraian secara e-court di PA Kabupaten Kediri tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Total Beban Perkara	Cabut	Putus	Penyelesaian	Rasio Penyelesaian	Sisa
1	Perdata Gugatan	58	735	793	67	671	738	93.06 %	55
2	Perdata Permohonan	3	81	84	11	70	81	96.43 %	3
Jumlah		61	816	877	78	741	819	93.39.00	58

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun perkara perceraian yang didaftarkan secara e-court, mengalami peningkatan dalam penyelesaiannya. Berbagai faktor penyebab perceraian tentu menjadi sorotan, khususnya faktor

ekonomi yang setiap tahunnya meningkat dan menjadi faktor terbanyak penyebab perceraian dibanding dengan faktor lainnya. Karena berdasarkan hasil wawancara, banyak yang mengajukan perceraian karena faktor ekonomi, dan rata-rata disebabkan kurangnya kesiapan lahir sebelum menjalin rumah tangga.

Dengan adanya aplikasi e-court yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung sebagai instrumen dalam proses penyelesaian perkara secara elektronik dianggap menjadi sistem yang memudahkan para pihak berperkara. Hal ini dapat dilihat dari proses tahapan e-court mulai dari pendaftaran (e-filing), pengguna terdaftar mendaftarkan perkaranya secara online dengan aplikasi e-court yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui website Mahkamah Agung. Pengguna melakukan login akun yang dimilikinya kemudian memilih Pengadilan tertentu sebagai tujuan dalam mengajukan gugatan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembayaran (e-payment), setelah pembayaran maka perkara akan diproses dan para pihak dipanggil secara elektronik (e-summons), kemudian tahap terakhir yaitu persidangan secara elektronik (e-litigasi).

B. Relevansi Aplikasi E-court Dalam Perkara Perceraian Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dalam penjelasan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi berperkara dan Persidangan secara Elektronik “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern” , dalam penjelasan ini berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penerapan hukum administrasi berperkara secara e-court menjadi instrumen perubahan yang efektif, hal ini dikaitkan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dalam proses pengajuan dan penanganan secara elektronik, mulai dari pendaftaran sampai persidangan dilakukan secara elektronik, tentu hal ini sangat mempermudah dan mempercepat para pihak dalam proses penyelesaian perkaranya. Contohnya seperti mengupload data dan informasi secara online dan dapat diakses tanpa perlu datang ke Pengadilan. tentu ini sangat berkaitan dengan asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tentang Implementasi Aplikasi E-court dan Relevansinya Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dinilai sesuai dan berjalan dengan efektif dan berjalan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana “*Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan*”.

Kedua, terkait dengan Relevansi implementasi aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian, mulai dari proses pendaftaran perkara sampai dengan tahapan penanganan perkara yang dinilai lebih sederhana, proses lebih cepat dan biaya lebih ringan. Penerapan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dinilai dapat menciptakan proses yang sesuai dengan harapan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Implementasi Aplikasi E-court dan Relevansinya Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan dengan penerapan pelayanan dengan sistem *e-court* dapat mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada. Selain itu dengan perkembangan yang lebih baik dapat memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas, dengan cara memperkenalkan sistem *e-court* yang tentu mempermudah dan memiliki keuntungan bagi para pihak berperkara jika menempuh dengan sistem ini. Bukan hanya memberikan informasi dan memperkenalkan, tetapi dari pihak Pengadilan dapat mensosialisasikan terkait penggunaan aplikasi *e-court* dalam mendaftarkan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, Bachtiar S. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10 (1). hal.46.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press.

Mukti, Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta:Pustaka Belajar.

Mahkamah Agung RI. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta.

Rozak, A, Billah, M., dan Maulana, D.F. 2021. “Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol 6 (2). hal.63